

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi lembaga, kinerja instansi pemerintah daerah menggambarkan tercapainya tujuan dan sasaran pemerintah serta menunjukkan derajat keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang diputuskan pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Epriliani, 2022). Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah harus beroperasi dengan cara yang melayani kepentingan publik dan memotivasi mereka untuk merespons lingkungannya dengan menawarkan layanan berkualitas tinggi secara terbuka dan transparan, serta memiliki pembagian tugas yang terorganisir dengan baik dalam struktur organisasinya. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan bertanggung jawab atas kinerja yang baik, manajemen atau aparatur organisasi publik memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi (Pokhrel, 2024).

Menurut (Fadillah, 2020) mengungkapkan bahwa Struktur politik yang digunakan suatu wilayah telah menjadi komponen penting dalam pembangunan keseluruhan suatu wilayah. Potensi daerah dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara efektif untuk mendorong kemajuan daerah melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.. Seperti yang kita tahu, bahwa negara kita adalah negara hukum yang tentunya memberi tuntutan terhadap Lembaga publik masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, untuk memberikan informasi keuangan lagi yang membutuhkan dan juga dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan (Penerapan et al., 2024). Apabila pemerintah daerah mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam mengelola, mengawasi, dan menggali sumber-sumber keuangan, serta memanfaatkan dana pribadi dalam jumlah yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, maka pemerintah daerah dikatakan berkinerja baik dan tidak

menggantungkan bantuan kepada Pemerintah Pusat sehingga peran Pemerintah Daerah menjadi lebih dominan (Keuangan et al., 2020).

Berdasarkan informasi dari <https://www.liputan6.com/showbiz> pada 16 Juli 2023 – 18 Juli 2023 bahwa sebanyak 13 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintahan Kota Bandar Lampung diperiksa oleh Kejaksaan Agung untuk mengklarifikasi realisasi anggaran dana daerah yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Pemeriksaan tersebut merupakan hasil laporan aduan masyarakat serta temuan Badan Pemeriksaan Keuangan diduga soal penyalahgunaan Anggaran pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 yang diterima oleh kejaksaan agung. Selain itu pemeriksaan ini adalah tanggung jawab dari OPD di kota Bandar Lampung atas pelaksanaan anggaran dana daerah, penyalahgunaan anggaran dana daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya memiliki kaitan erat dengan OPD sebagai unit kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada terhambatnya pembangunan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, melihat terjadinya tindakan ini maka perlu diterapkan Kinerja Pemerintah yang didukung oleh kejelasan anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, *good governance* dan pengawasan internal yang baik agar dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi pada suatu organisasi.

Selain itu, munculnya konsep *Good Governance* adalah akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Sebagai pelaku utama dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus memberikan akuntabilitas yang lebih akurat dan transparan. Bergantung pada kemampuan pasar, masyarakat, dan pemerintah, praktik tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan secara bertahap. (Pokhrel, 2024). lalu, dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat akan hasil yang diberikan dari tujuan tersebut dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) itu sendiri. *Good governance* mengandung beberapa prinsip. Dalam penerapannya *good governance* dikenal dengan adanya lima prinsip utama, kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan keadilan (Maimanah, dkk 2024). Menerapkan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan mendukung kepentingan rakyat. Apabila prinsip itu diterapkan dalam suatu pemerintahan daerah, maka *good governance* akan tercapai dan kinerja sebuah pemda akan menjadi lebih baik (Maimanah, dkk, 2024).

Isu yang saat ini terjadi terkait *Good Governance* menjadi perhatian utama dalam administrasi publik. Masyarakat menuntut pemerintah, terutama pelaksana pemerintahan hingga pengambil kebijakan, untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Maka, respon yang baik dari pemerintah diperlukan untuk merespon tuntutan wajar masyarakat ini, melalui perubahan dan perbaikan yang terarah, guna mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik (Mulyah, dkk, 2020). Menurut (Aisy, 2024) menerangkan bahwa masyarakat menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dirasa masih kurang memuaskan. Karena itu, masyarakat menuntut kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penerapan otonomi daerah. Pasal 3 dan 5 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan adanya prinsip umum penyelenggaraan negara yang memerlukan transparansi sehingga penyelenggara negara diharuskan untuk bersedia menjalani pemeriksaan atas kekayaannya sebelum, selama, dan setelah masa jabatan serta melarang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melihat kejadian tersebut, maka *Good governance* diartikan sebagai penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola berbagai urusan politik di semua tingkatan pemerintahan. Prinsip ini mencakup sejumlah indikator seperti efektivitas, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, produktivitas, kesetaraan, serta penegakan hukum. Di antara semua indikator tersebut, aspek yang paling krusial dalam *Good Governance* adalah bagaimana kewenangan dan kekuasaan digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik secara adil dan efisien (Epriliani, 2022).

Tak kalah pentingnya, Pemerintah daerah wajib melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya untuk mendukung dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) guna mengatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, pengawasan diperlukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tersebut. (Neneng Karlina et al., 2023). Pengawasan ini merupakan tujuan untuk mencegah sebanyak mungkin penyimpangan, pemborosan, pencurian, hambatan, kesalahan, dan kegagalan ketika menyangkut pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi. Pengawasan internal adalah keseluruhan proses yang mencakup kegiatan audit, evaluasi, peninjauan, pemantauan, serta bentuk pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dijalankan sesuai dengan standar yang diterapkan secara efektif dan efisien guna mendukung pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (berdasarkan peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal) (Jatmiko et al., 2020). Pengawasan internal dapat membantu organisasi mencapai kinerja dan target yang menguntungkan serta mencegah hilangnya sumber daya. Pengawasan internal dapat berkontribusi pada terciptanya laporan keuangan yang tepercaya. Pengawasan internal juga dapat memastikan kepatuhan organisasi terhadap hukum dan peraturan, sehingga terhindar dari reputasi buruk dan segala konsekuensinya. (Epriliani, 2022).

Akuntansi sektor publik merupakan entitas yang unik dan berbeda. Karena memiliki sumber daya keuangan yang signifikan, bahkan sangat besar, Organisasi sektor publik juga terlibat dalam kegiatan keuangan dan ekonomi, tetapi mereka mengelola sumber daya keuangannya untuk tujuan nirlaba, berbeda dengan entitas ekonomi lainnya, terutama perusahaan komersial yang mencari laba. (Salamah et al., 2021). Menyediakan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas merupakan tujuan akuntansi sektor publik. Akses terhadap layanan publik, antara lain, merupakan indikator kunci keberhasilan layanan publik. Misalnya, kesejahteraan seluruh

masyarakat akan terdampak jika suatu wilayah tidak memiliki akses terhadap layanan esensial yang seharusnya tersedia bagi semua orang. Oleh karena itu, pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangatlah penting. (Neneng Karlina et al., 2023). Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi, dalam hal ini instansi pemerintah perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Daerah et al., 2023).

Selanjutnya, adanya tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan dalam menjelaskan berhasil tidaknya tanggung jawab organisasi guna mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Karakteristik tujuan anggaran dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan APBD secara keseluruhan. Sasaran anggaran yang telah dirumuskan secara jelas mempermudah aparatur dalam menyelaraskan perencanaan anggaran dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Nurmin & Masyita, 2023). Menurut (Pokhrel, 2024) Bahwa Kejelasan sasaran anggaran mencakup pemahaman yang jelas tentang tujuan keuangan yang hendak dicapai, dengan begitu bisa dipahami oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya dan menjadi ciri khas dalam sistem penganggaran berupa pendapatan, belanja, atau penghematan yang direncanakan untuk mencapai target yang sudah dirancang. Kejelasan sasaran anggaran memperlihatkan secara tepat sasaran yang dicapai oleh pemerintah, atas pencapaian tersebut pemerintah memiliki informasi yang cukup mengenai sasaran anggaran, kelengkapan informasi ini mendorong kinerja aparatur dalam pencapaian tujuan organisasi, dengan kejelasan sasaran anggaran yang diterapkan oleh pemerintah dapat membantu mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kualitas et al., 2023).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Neneng Karlina et al., 2023 dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good*

Gorvenance dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah” telah membahas pengaruh beberapa faktor tata kelola dan sistem akuntansi terhadap kinerja instansi pemerintah secara umum. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Neneng Karlina et al., 2023 belum mempertimbangkan variabel kejelasan sasaran anggaran sebagai faktor penting dalam pengelolaan anggaran yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan. Kejelasan sasaran anggaran berperan dalam memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap penggunaan anggaran, serta meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja dalam instansi pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menambahkan variabel kejelasan sasaran anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan relevan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “ Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Gorvenance*, dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Bandar Lampung ?
2. Apakah Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kota Bandar Lampung ?
3. Apakah Penerapan Prinsip *Good Gorvenance* berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Bandar Lampung ?
4. Apakah Pengawasan Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Bandar Lampung ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup Subjek penelitian yakni pegawai atau pejabat struktural yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengawasan internal di masing-masing OPD

1.3.2 Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian yang digunakan yaitu Instansi OPD Kota Bandar Lampung.

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian yang digunakan yaitu Instansi OPD Kota Bandar Lampung.

1.3.4 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan

Ruang lingkup ilmu pengetahuan yang digunakan yaitu Ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya berfokus pada Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi Publik, *Good Governance* dan Pengawasan Internal.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan latar belakang masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Bandar Lampung.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Bandar Lampung.
3. Menguji secara empiris dan menganalisis Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Bandar Lampung.
4. Menguji secara empiris dan menganalisis Pengaruh Pengawasan Internal terhadap terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat kepada berbagai pihak.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi, pengetahuan, serta pemahaman mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Governance* dan Pengawasan Internal. Selain itu, sebagai penelitian yang digunakan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah, sehingga nantinya dapat dijadikan bekal dalam dunia kerja.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memberikan masukan bagi perusahaan mengenai pentingnya meningkatkan kinerja dalam Instansi Pemerintah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, *Good Governance* dan Pengawasan Internal, serta Kinerja di Instansi Pemerintahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat agar memudahkan pembaca mengenai penelitian yang telah diuraikan ini dengan tiap babnya, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan terkait Latar belakang yang mencakup alasan diadakannya penelitian, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan terkait dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang terdiri atas variabel penelitian sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dengan menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab yang berisi penutup berupa sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berisikan saran untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian yang berisi tentang kesimpulan dan berbagai daftar jurnal ilmiah, hasil penelitian yang dilakukan orang lain, daftar buku-buku, dan bahan-bahan penelitian lainnya yang telah dijadikan referensi dalam penelitian ini.

LAMPIRAN

Bagian yang berisi hasil dari suatu penelitian, baik berupa gambar, foto, teks, dan lain sebagainya.